

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### a. Keadaan Geografis Kabupaten Demak

Demak ialah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Demak berada di sebelah utara perbatasan Kabupaten Jepara serta Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan serta Kota Semarang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Kabupaten Demak terletak pada koordinat 6043'26" - 7009'43" Lintang Selatan dan 110027'58" - 110048'47" Bujur Timur. Demak memiliki luas daerah 897,43 km<sup>2</sup>, yang terdapat 14 kecamatan, 243 desa, serta 6 kelurahan dengan luas daerah yang beragam. Berikut tabel 4.1 data luas daerah per kecamatan di Kabupaten Demak:

**Tabel 4. 1 Keadaan Geografis Kabupaten Demak**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan	Luas Area	Persentase Terhadap Luas Wilayah
	<i>Capital of Subdistrict</i>	<i>(km<sup>2</sup>/sq.km)</i>	<i>Percentage to Area</i>
1. Mranggen	Mranggen	72,22	8,05
2. Karangawen	Karangawen	66,95	7,46
3. Guntur	Guntur	57,53	6,41
4. Sayung	Sayung	78,69	8,77
5. Karangtengah	Karangtengah	51,55	5,74
6. Bonang	Bonang	83,24	9,28
7. Demak	Demak	61,13	6,81
8. Wonosalam	Wonosalam	57,88	6,45
9. Dempet	Dempet	61,61	6,87
10. Kebonagung	Kebonagung	41,99	4,68
11. Gajah	Gajah	47,83	5,33
12. Karanganyar	Karanganyar	67,76	7,55
13. Mijen	Mijen	50,29	5,60
14. Wedung	Wedung	98,76	11,00
Demak	Demak	897,43	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Demak (*Demak Dalam Angka 2021*)<sup>119</sup>

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa Kecamatan Wedung ialah kecamatan dengan area yang paling luas, yakni sekitar 98,76 km<sup>2</sup> atau sekitar 11% di Kabupaten Demak. Sedangkan kecamatan yang terkecil ialah Kecamatan Kebonagung dengan luas sekitar 41,99 km<sup>2</sup> atau 4,68%.

## b. Keadaan Demografis Kabupaten Demak

### 2) Keadaan Penduduk

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.203.956 jiwa. Penduduk Kabupaten Demak didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 607.820 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan sebanyak 596.136 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,96 yang mana 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.<sup>120</sup> Usia penduduk produktif yang bekerja di Kabupaten Demak didominasi oleh penduduk laki-laki yang berusia 35-39 tahun yakni sebanyak 48.085 jiwa.

### 3) Mayoritas Agama Penduduk

Penduduk Kabupaten Demak mayoritas memeluk agama islam sebanyak 1.193.902 jiwa. Berikut tabel 4.2 yang menunjukkan mayoritas penduduk Kabupaten Demak memeluk agama islam:

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk dan Agama Kabupaten Demak**

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	1.193.902 jiwa
2.	Protestan	6.889 jiwa
3.	Katolik	2.895 jiwa
4.	Hindu	71 jiwa
5.	Budha	166 jiwa
6.	Lainnya	33 jiwa
Demak		1.203.956 jiwa

<sup>119</sup>BPS Kabupaten Demak, *Demak Dalam Angka 2021*, (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2021), 3-7

<sup>120</sup>BPS Kabupaten Demak, *Demak Dalam Angka 2021*, (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2021), 34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak<sup>121</sup>

4) Pendidikan di Kabupaten Demak

Pembangunan pada sumber daya manusia bisa dilaksanakan dengan pendidikan. Hal ini memaparkan bahwa terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Demak. Berikut tabel jumlah penduduk beserta jenjang pendidikan di Kabupaten Demak tahun 2016-2020:

**Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk yang Mencapai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2016-2020**

N o	Kategori/Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tidak/belum sekolah	189.318	191.330	206.518	221.757	246.188
2.	Belum tamat/SD/ sederajat	123.345	125.110	124.416	121.160	134.127
3.	Tamat SD/ sederajat	370.203	363.103	362.643	359.904	344.576
4.	SLTP/ sederajat	217.094	218.809	216.776	217.850	223.323
5.	SLTA/ sederajat	176.440	181.799	187.385	195.344	200.704
6.	Diploma I/II	3.341	3.283	3.222	3.194	3.086
7.	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	8.684	8.939	9.195	9.563	9.573
8.	Diploma IV/ Strata I	23.167	24.740	26.314	28.314	29.381
9.	Strata II	1.382	1.452	1.533	1.640	1.708
10	Strata III	40	41	44	46	46

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak tahun 2020<sup>122</sup>

<sup>121</sup>“Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Agama Kab. Demak 2021,” Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak tahun 2021

<sup>122</sup>“Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir,” Dindukcapil Kabupaten Demak diakses 10 Juli 2022 <https://data.demakkab.go.id/id/organization/dindukcapil>

## 2. Subyek Penelitian

Riset ini dilaksanakan guna mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat daerah yang bisa dilihat dari data pendapatan asli daerah di Kabupaten Demak. Riset ini mempergunakan data time series dari tahun 2011-2020 yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak berupa Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 26 dalam melaksanakan pengolahan data dengan metode regresi linier berganda.

Berikut disajikan tabel mengenai beberapa data yang dibutuhkan pada penelitian ini yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.

**Tabel 4. 4 Pajak Hotel Kabupaten Demak Tahun 2011-2020**

Tahun	Pajak Hotel	Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel (%)
2011	Rp14.025.000	2,52
2012	Rp12.975.000	-7,49
2013	Rp15.565.000	19,97
2014	Rp62.026.496	298,50
2015	Rp178.361.029	187,56
2016	Rp491.789.855	175,72
2017	Rp342.469.148	-30,36
2018	Rp397.813.497	16,16
2019	Rp422.553.964	6,21
2020	Rp319.792.602	-24,31

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan*<sup>123</sup>

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pajak hotel Kabupaten Demak bergerak secara fluktuatif pada tahun 2011-2019 Tetapi pada tahun 2020 terjadi kemerosotan yang bisa dibilang besar, dari pajak hotel sebanyak 422.553.964 pada tahun 2019 menjadi

<sup>123</sup>“Pajak Hotel,” Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan Tahun 2011-2020, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak tahun 2011-2021

319.792.602 pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan adanya pandemi *covid-19* yang terjadi.

**Tabel 4. 5 Pajak Restoran Kabupaten Demak Tahun 2011-2020**

Tahun	Pajak Restoran	Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran (%)
2011	Rp75.209.000	4,68
2012	Rp762.497.674	913,83
2013	Rp1.051.088.111	37,85
2014	Rp1.392.468.892	32,48
2015	Rp2.026.993.985	45,56
2016	Rp2.549.068.709	25,76
2017	Rp3.186.211.993	25,00
2018	Rp3.997.235.188	25,46
2019	Rp4.327.959.937	8,27
2020	Rp3.926.998.535	-9,26

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan<sup>124</sup>

Tabel 4.5 membuktikan bahwa Pajak Restoran Kabupaten Demak selalu terjadi kenaikan dari tahun ke tahun akan tetapi tidak stabil. Namun pada tahun 2020 Pajak Restoran mengalami penurunan menjadi Rp3.926.998.535 dengan rata-rata pertumbuhan menjadi -9,26% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp4.327.959.937. Hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi *covid-19* yang terjadi.

**Tabel 4. 6 Pajak Hiburan Kabupaten Demak Tahun 2011-2020**

Tahun	Pajak Hiburan	Tingkat Pertumbuhan Pajak Hiburan (%)
2011	Rp15.000.000	9,09
2012	Rp17.000.000	13,33
2013	Rp17.000.000	0
2014	Rp25.000.000	47,05
2015	Rp52.963.133	111,85
2016	Rp175.488.650	231,34
2017	Rp173.316.275	-1,23

<sup>124</sup>“Pajak Restoran,” Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan Tahun 2011-2020, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak tahun 2011-2021

2018	Rp210.532.060	21,47
2019	Rp336.791.050	59,97
2020	Rp94.472.275	-71,94

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan<sup>125</sup>

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Pajak Hiburan Kabupaten Demak bergerak secara fluktuatif. Terutama pada tahun 2016, meningkat secara signifikan yakni sebesar Rp175.488.650 dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp52.963.133. Selanjutnya tahun 2017 terjadi kemerosotan menjadi Rp173.316.275. Tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup parah menjadi Rp94.472.275 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan -71,94% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp336.791.050. Hal ini diakibatkan karena adanya pandemi *covid-19* yang terjadi.

**Tabel 4. 7 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan PAD (%)
2011	Rp1.284.043.000	17,34
2012	Rp2.186.608.674	70,29
2013	Rp2.524.538.451	15,45
2014	Rp2.958.625.388	17,19
2015	Rp111.843.730.014	3.680,25
2016	Rp287.457.500.571	157,01
2017	Rp309.641.748.737	7,71
2018	Rp342.324.870.245	10,56
2019	Rp407.400.540.995	19,00
2020	Rp439.694.424.385	7,92

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan<sup>126</sup>

<sup>125</sup>“Pajak Hiburan,” Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan Tahun 2011-2020, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak tahun 2012-2021

<sup>126</sup>“Pendapatan Asli Daerah,” Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan Tahun 2011-2020, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak tahun 2012-2021



Tabel 4.7 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak terus terjadi kenaikan. Terutama pada tahun 2015, meningkat secara signifikan yakni sebesar Rp111.843.730.014 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3.680,25% dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp2.958.625.388. Begitupun tahun-tahun berikutnya yang terus meningkat. Padahal komponen PAD seperti Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan menurun.

### 3. Hasil Penelitian

#### a. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan guna mengetahui apakah data beredar secara normal atau tidak. Data dikatakan beredar normal jika signifikansi  $> 0,05$

**Tabel 4. 8 Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Data	Jumlah Data	Nilai Sig.	Kesimpulan
Unstandardized Residual	10	.200	Normal

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26*

Berdasarkan tabel 4.8 memaparkan bahwa hasil pengolahan data pada spss pada Uji Normalitas, didapatkan hasil normal. Hal ini diketahui dari nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* yakni sebesar 0,200 yang berarti  $> 0,05$ . Dimana hal tersebut sesuai dengan kriteria dari Uji Normalitas yakni data dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi  $> 0,05$

##### 2) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dipakai guna mengetahui apakah ada korelasi ataupun kaitan antar variabel. Kriteria dari Uji Multikolonieritas bisa dilihat dari (1) nilai *tolerance* serta (2) *variance inflation factor (VIF)* sebagai standar. Jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  serta nilai *VIF*  $\geq 10$  maka bisa disimpulkan bahwa pada riset ini terjadi multikolonieritas<sup>127</sup>

<sup>127</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, 157

**Tabel 4. 9 Uji Multikolonieritas**

<b>Data</b>	<b>Jumlah Data</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Kesimpulan</b>
Pajak Hotel	10	.181	5.531	Tidak terjadi gejala multikolonieritas
Pajak Restoran	10	.209	4.788	Tidak terjadi gejala multikolonieritas
Pajak Hiburan	10	.218	4.596	Tidak terjadi gejala multikolonieritas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa:

- a) Nilai *tolerance* pada jumlah wisatawan sebesar 0.181. Artinya nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan Nilai VIF pada jumlah wisatawan sebesar 5.531. Artinya nilai  $VIF \leq 10,00$
- b) Nilai *tolerance* pada pajak restoran sebesar 0.209. Artinya nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan Nilai VIF pada pajak restoran sebesar 4.788. Artinya nilai  $VIF \leq 10,00$
- c) Nilai *tolerance* pada retribusi daerah sebesar 0,218. Artinya nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan Nilai VIF pada retribusi daerah sebesar 4.596. Artinya nilai  $VIF \leq 10,00$

Hal ini membuktikan bahwa semua nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai  $VIF \leq 10,00$ , sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas pada penelitian ini.

### 3) Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Uji Heteroskedastisitas bermaksud membuktikan apakah dalam model regresi terdapat perbedaan *variance* dari residual satu riset ke riset yang lain.<sup>128</sup> Riset ini menggunakan Uji Glejser sebagai Uji Heteroskedastisitas untuk menghubungkan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Hasil pengujian bisa dikatakan tidak terdapat

<sup>128</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, 178



heteroskedastisitas apabila nilai propabilitas signifikan di atas 0,05.<sup>129</sup>

**Tabel 4. 10 Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser**

Data	Jumlah Data	Sig.	Kesimpulan
Pajak Hotel	10	.822	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Pajak Restoran	10	.324	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Pajak Hiburan	10	.253	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26*

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa:

- a) Nilai signifikansi pada pajak hotel sebesar 0,822 atau  $> 0,05$ .
- b) Nilai signifikansi pada pajak restoran sebesar 0,324 atau  $> 0,05$ .
- c) Nilai signifikansi pada pajak hiburan sebesar 0,253 atau  $> 0,05$ .

Hal ini membuktikan bahwa semua nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sehingga bisa disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

#### 4) Uji Autokorelasi (Run Test)

Uji Autokorelasi bermaksud membuktikan apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (yang lalu). Pada riset ini menggunakan *Run Test* guna mengecek apakah data antar variabel pengganggu banyak terkandung hubungan korelasi.<sup>130</sup> *Run Test* yakni sebuah persamaan regresi dinyatakan terbebas

<sup>129</sup>Risky Primadita Ayuwardani, "Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)", *Jurnal Nominal Vol. 7, No.1, 2018*: 148

<sup>130</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, 170

autokorelasi bila nilai signifikansi uji statistik run test > 0,05.<sup>131</sup>

**Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi-Run Test**

Data	Jumlah Data	Nilai Sig.	Kesimpulan
Unstandardized Residual	10	.737	Tidak terjadi gejala autokorelasi

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26*

Tabel 4.11, diketahui bahwa data tidak memiliki gejala autokorelasi. Hal tersebut dikarenakan hasil pengujian memperoleh nilai sig. 0.737 > 0.05 yakni nilai sig. lebih besar dari 0.05. sehingga berdasarkan pengambilan keputusan pada uji *run test* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

**b. Analisis Regresi Linier Berganda**

Regresi linear berganda bertujuan guna membuktikan pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*explanatory*) pada satu variabel terikat. Regresi Linear Berganda terdapat rumus persamaan yakni:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

<sup>131</sup>Hellen Widya Putri, dkk, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”, *Jurnal Akuntansi & Manajemen* 13, No. 1 2018: 28

**Tabel 4. 12 Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-76457064032.685	34472300885.525	
Pajak Hotel	378.151	224.939	.391
Pajak Restoran	88.141	26.508	.720
Pajak Hiburan	-210.329	357.550	-.125

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$= -76.457.064.032,685 + 378.151.X_1 + 88.141.X_2 - 210.329.X_3 + e$$

Tabel 4.12 persamaan data Analisis Regresi Linear Berganda di atas bisa disimpulkan bahwa,

- 1) Nilai konstanta Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -76.457.064.032,685, yang menyatakan bahwa jika variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) = 0, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) = -76.457.064.032,685
- 2) Nilai koefisien Pajak Hotel (X1) sebesar 378.151 artinya setiap kenaikan 1 unit nilai Pajak Hotel (X1) akan menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 378.151. Nilai koefisien positif, berarti terjadi hubungan positif antara Pajak Hotel (X1) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y), maka bila Pajak Hotel (X1) meningkat Pendapatan Asli Daerah (Y) juga meningkat.
- 3) Nilai koefisien Pajak Restoran (X2) sebesar 88.141 artinya setiap kenaikan 1 unit nilai Pajak Restoran (X2) akan menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 88.141. Nilai koefisien positif, berarti terjadi hubungan yang positif antara Pajak Restoran (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y), maka bila Pajak Restoran

- (X2) meningkat, Pendapatan Asli Daerah (Y) juga akan meningkat
- 4) Nilai koefisien Pajak Hiburan (X3) sebesar -210.329 artinya setiap kenaikan 1 unit nilai Pajak Hiburan (X3) akan mengurangi nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -210.329. Nilai koefisien negatif berarti terjadi hubungan yang negatif antara Pajak Hiburan (X3) dan Pendapatan Asli Daerah (Y), maka jika Pajak Hiburan (X3) menurun, Pendapatan Asli Daerah (Y) juga akan menurun.

Apabila koefisien memiliki nilai negatif maka menunjukkan terjadi hubungan negatif antara pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Maka apabila pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan turun, maka pendapatan asli daerah akan ikut turun.

**c. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dipakai guna memperkirakan kontribusi pengaruh variabel X secara simultan pada variabel Y.

**Tabel 4. 13 Koefisien Determinasi (R Square)**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.970	.941	.912	54516820695.65762

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26*

Tabel 4.13 nilai *R Square* sebesar 0,941, maka memiliki arti bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Pajak Hiburan memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 94.1% terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sisanya 5.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**d. Uji Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F Uji F bermaksud membuktikan apakah variabel bebas dengan serentak berpengaruh terhadap variabel terikat. Guna menguji hipotesis ini dipakai statistik F dengan ciri-ciri pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 0,05. Jadi memberi indikasi bahwa uji parsial t akan ada salah satu atau semua signifikan
- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka Ha diterima dan Ho ditolak

- 3) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima  
 4) Jika uji F ternyata hasilnya tak signifikan, maka bisa dipastikan bahwa uji parsial t tak ada yang signifikan.<sup>132</sup>

**Tabel 4. 14 Uji Simultan (Uji F)**

Variabel Y	Variabel X	F	Nilai Sig.	Kesimpulan
PAD	Pajak Hotel	32.067	.000	H1, H2 dan H3 Diterima
	Pajak Restoran			
	Pajak Hiburan			

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26*

Tabel 4.14, diketahui nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara simultan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan perbandingan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 32.067. Karena nilai  $F_{hitung}$   $32.067 > F_{tabel}$  4,76. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam Uji F bisa disimpulkan bahwa Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (Y).

**e. Uji Parsial (Uji t)**

Uji ini dipakai guna membuktikan seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Upaya untuk menguji uji t ialah bila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai yang dihasilkan pada tingkat yang signifikansi di atas 0,05, maka pengujian mampu menolak  $H_a$  sehingga ditolak serta  $H_o$  diterima, artinya pajak hotel, pajak restoran serta pajak restoran tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai yang dihasilkan pada tingkat yang signifikansi di bawah 0,05, berarti pengujian ini gagal menerima  $H_o$  dan  $H_a$  diterima, artinya pajak hotel, pajak

<sup>132</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, 148

restoran, serta pajak hiburan mempengaruhi pendapatan asli daerah.<sup>133</sup>

- 1) Uji t (parsial) antara pajak hotel dan pendapatan asli daerah

Uji parsial dilaksanakan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : terdapat pengaruh antara pajak hotel dan pendapatan asli daerah

Ho : tidak terdapat pengaruh antara pajak hotel dan pendapatan asli daerah

Berikut ini merupakan hasil uji parsial pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah menggunakan perhitungan SPSS 26

**Tabel 4. 15 Uji t Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Variabel Y	Variabel X	Jumlah Data	Nilai Sig.	Nilai t	Kesimpulan
PAD	Pajak Hotel	10	0.144	1.681	H1 Ditolak

Tabel 4.15 hasil pengolahan data spss 26 dapat dilihat Variabel pajak hotel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,144 ( $> 0,05$ ), maka berkesimpulan variabel pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (H1 ditolak).

Berdasarkan pengambilan keputusan melalui perbandingan nilai t memperoleh hasil bahwa  $t_{hitung} 1.681 < t_{tabel} 2.44691$ , maka dapat dinyatakan bahwa H1 ditolak dan menerima Ho, artinya pajak hotel memiliki nilai positif namun tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. jika pajak hotel ditingkatkan maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat namun peningkatannya tidak signifikan.

- 2) Uji t (parsial) antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah

Uji parsial dilaksanakan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>133</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, 148-149



H2 : terdapat pengaruh antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah

Ho : tidak terdapat pengaruh antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah

Berikut ini merupakan hasil uji parsial pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menggunakan perhitungan SPSS 26

**Tabel 4. 16 Uji t Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Variabel Y	Variabel X	Jumlah Data	Nilai Sig.	Nilai t	Kesimpulan
PAD	Pajak Restoran	10	0.016	3.325	H2 Diterima

Tabel 4.16 hasil pengolahan data spss 26 dapat dilihat Variabel pajak restoran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016 ( $< 0,05$ ), maka berkesimpulan variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (H2 diterima).

Berdasarkan pengambilan keputusan melalui perbandingan nilai t memperoleh hasil bahwa  $t \text{ hitung } 3.325 > t \text{ tabel } 2.44691$ , maka dapat dinyatakan bahwa H2 diterima dan menolak Ho. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran memiliki nilai positif dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

- 3) Uji t (parsial) antara pajak hiburan dan pendapatan asli daerah

Uji parsial dilaksanakan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : terdapat pengaruh antara pajak hiburan dan pendapatan asli daerah

Ho : tidak terdapat pengaruh antara pajak hiburan dan pendapatan asli daerah

Berikut ini merupakan hasil uji parsial pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah menggunakan perhitungan SPSS 26

**Tabel 4. 17 Uji t Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Variabel Y	Variabel X	Jumlah Data	Nilai Sig.	Nilai t	Kesimpulan
PAD	Pajak Hiburan	10	0.578	-0.588	H3 Ditolak

Tabel 4.17 hasil pengolahan data spss 26 dapat dilihat Variabel pajak hiburan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,578 ( $> 0,05$ ), maka berkesimpulan variabel pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (H3 ditolak).

Berdasarkan pengambilan keputusan melalui nilai t memperoleh hasil bahwa  $t_{hitung} -0.588 < t_{tabel} 2.44691$ , maka bisa dinyatakan bahwa H3 ditolak dan Ho diterima. Bisa disimpulkan bahwa pajak hiburan bernilai negatif dan tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

## B. Pembahasan

Penelitian ini digunakan guna mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020. Berikut penjelasan masing-masing variabel:

### 1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020

Hasil pengujian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa hipotesis pertama yakni Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020 ditolak. Hal ini berdasarkan hasil uji t atau uji parsial nilai  $t_{hitung} 1.681 < \text{nilai } t_{tabel}$  sebesar 2,44691 serta nilai signifikansinya sebesar  $0.144 > 0.05$  maka H1 ditolak dan menerima Ho. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak serta menunjukkan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020. Hasil tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Magdalena Silawati Samosir yang memperoleh nilai sig.  $0.260 > 0.05$  yang menunjukkan Pajak Hotel memiliki nilai positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.<sup>134</sup>

<sup>134</sup>Magdalena Silawati Samosir, Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka”, *Journal of Public Administration and Government 2, No. 1 (2020): 42*

Selain itu hasil regresi linear berganda menunjukkan koefisien B sebesar 378.151 yang artinya setiap 1 unit nilai Pajak Hotel akan meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 378.151 rupiah dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan *Schumpeter* yang mana menyatakan bahwa hotel perlu didukung oleh kreasi dan inovasi yang mampu menghasilkan perpaduan-perpaduan yang baru dan lebih menyegarkan. Sehingga wisatawan tertarik untuk menginap serta mengunjungi hotel yang ada dan menjadikan pendapatan hotel meningkat. Sehingga pajak hotel juga meningkat.<sup>135</sup> Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Didukung oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Natya Mutiarahajarani, dkk yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.<sup>136</sup> Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur. Diperkuat lagi oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Syifa Vidya Sofwan, dkk yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.<sup>137</sup>

Hal ini disebabkan karena kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak cukup rendah. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>135</sup>Saparila Worokinasih, *Youth Entrepreneur*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 6

<sup>136</sup>Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)", *e-Proceeding of Management 5, No. 2 (2018)*: 2327

<sup>137</sup>Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, dan Sahrul Ramadhan, "Pengaruh pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020", *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi 12, No. 3, (2021)*: 22

**Tabel 4. 18 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Demak Tahun 2018-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel	Kontribusi (%)
2018	Rp342.324.870.245	Rp397.813.497	2.87
2019	Rp407.400.540.995	Rp422.553.964	0.27
2020	Rp439.694.424.386	Rp319.792.602	0.20

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan*

Hal tersebut terjadi lantaran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah hotel dan akomodasi lainnya Kabupaten Demak tidak bertambah. Berikut tabel jumlah hotel dan akomodasi lainnya tahun 2018-2020:

**Tabel 4. 19 Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya
2018	15
2019	15
2020	15

*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2019, 2020, 2021*

Selain itu, penerimaan pajak hotel yang tak tentu setiap bulannya disebabkan tinggi rendahnya pemungutan pajak hotel tergantung jumlah konsumen yang menikmati serta membayar pelayanan penginapan yang juga berperan sebagai subyek hotel. Oleh sebab itu, pajak hotel tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak.

## **2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak tahun 2011-2020**

Hasil pengujian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020 diterima. Hal ini berdasarkan hasil uji parsial yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3.325 >$  nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $2.44691$ , dan nilai signifikansinya sebesar  $0.016 < 0.05$  maka  $H_2$  diterima dan menolak  $H_0$ . Hal ini bisa disimpulkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Demak Tahun 2011-2020. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Natya Mutiarahajarani, dkk yang memperoleh nilai sig.  $0.001 < 0.05$  yang menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.<sup>138</sup> Selain itu, hasil regresi linier berganda menunjukkan nilai koefisien B sebesar 88.141 juta artinya setiap 1 unit nilai Pajak Restoran akan menambah nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 88.141 juta dengan asumsi variabel lainnya tetap.

(PAD) sesuai dengan teori *stakeholder* yang berbunyi Semakin besar penerimaan pajak dalam suatu daerah akan meningkatkan nilai PAD dalam wilayah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Natya Mutiarahajarani, dkk yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Tasikmalaya.<sup>139</sup> Diperkuat oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani yang menyatakan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur.<sup>140</sup> Diperkuat lagi oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Syifa Vidya Sofwan, dkk yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.<sup>141</sup> Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin yang menyatakan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.<sup>142</sup>

---

<sup>138</sup>Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)”, *e-Proceeding of Management 5, No. 2 (2018): 2327*

<sup>139</sup>Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)”, *e-Proceeding of Management 5, No. 2 (2018): 2327*

<sup>140</sup>Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani, “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur”, *Jurnal Proaksi 8, No. 2, (2021): 535*

<sup>141</sup>Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, dan Sahrul Ramadhan, “Pengaruh pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020”, *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi 12, No. 3, (2021): 23*

<sup>142</sup>Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati”, *JAB 2, No. 2, (2016): 46*



Hal ini disebabkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Demak cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 20 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Demak Tahun 2018-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Restoran	Kontribusi (%)
2018	Rp342.324.870.245	Rp3.997.235.188	2.89
2019	Rp407.400.540.995	Rp4.327.959.937	2.77
2020	Rp439.694.424.386	Rp3.926.998.535	2.56

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan*

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran cukup tinggi dibandingkan pajak hotel dan pajak hiburan. Tahun 2018 pajak restoran berkontribusi sebesar 2.89%. Tahun 2019 kontribusi turun menjadi 2.77%. begitu pula kontribusi tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 2.56%. Hal ini karena restoran-restoran yang ada di Kabupaten Demak cukup banyak serta tetap buka saat terjadi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan, pembatasan jumlah pengunjung yang dianjurkan pemerintah serta memberlakukan sistem *take a way* atau tidak makan ditempat. Oleh sebab itu, kontribusi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Demak tetap menjadi salah satu yang terbesar, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah juga meningkat. Berikut Jumlah Restoran Kabupaten Demak menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2016-2020:

**Tabel 4. 21 Jumlah Restoran Kabupaten Demak Tahun 2017-2020**

Tahun	Jumlah Restoran
2017	10
2018	10
2019	119
2020	119

*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2021*

Selain itu, dengan di dukung oleh perkembangan zaman, para pelanggan restoran Kabupaten Demak bisa memesan makanan melalui aplikasi yang tersedia. Sehingga memudahkan masyarakat tidak perlu keluar rumah dan berkerumun. Jadi hal



tersebut mampu meningkatkan Penerimaan dari Pajak Restoran sehingga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak meningkat.

### 3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak tahun 2011-2020

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yaitu Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020 ditolak. Hal ini berdasarkan dari hasil uji parsial menunjukkan nilai  $t_{hitung} -0.588 < \text{nilai } t_{tabel}$  sebesar 2.44691 dan nilai signifikansinya sebesar  $0.578 > 0.05$   $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Demak Tahun 2011-2020. Selaras dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Natya Mutiarahajarani dkk yang memperoleh nilai sig.  $0.264 > 0.05$  yang menunjukkan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.<sup>143</sup> Selain itu, hasil regresi linier berganda menunjukkan koefisien B sebesar -210.329 juta artinya setiap 1 unit nilai Pajak Hiburan akan mengurangi nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar -210.329 juta.

Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini selaras dengan teori pertumbuhan *Schumpeter* yang mana menyatakan bahwa dalam hal ini perlu didukung oleh kreasi dan inovasi yang mampu menghasilkan perpaduan-perpaduan yang baru dan lebih menyegarkan. Sehingga masyarakat tertarik untuk menonton serta mengunjungi hiburan yang ada dan menjadikan pendapatan meningkat.<sup>144</sup> Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Natya Mutiarahajarani, dkk yang menyatakan bahwapajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.<sup>145</sup> Diperkuat oleh Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani yang menyatakan bahwa pajak hiburan tidak

---

<sup>143</sup>Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)", *e-Proceeding of Management 5, No. 2 (2018): 2327*

<sup>144</sup>Saparila Worokinasih, *Youth Entrepreneur*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 6

<sup>145</sup>Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)", *e-Proceeding of Management 5, No. 2 (2018): 2327*

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa timur.<sup>146</sup> Diperkuat lagi oleh Magdalena Silawati Samosir yang menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.<sup>147</sup>

Hal ini disebabkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Demak rendah. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 22 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Demak tahun 2018-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hiburan	Kontribusi (%)
2018	Rp342.324.870.245	Rp210.532.060	0.15
2019	Rp407.400.540.995	Rp336.791.050	0.21
2020	Rp439.694.424.386	Rp94.472.275	0.06

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan*

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak sangat rendah, yakni sebesar 0.15% pada tahun 2018 sebesar 0.21% pada tahun 2019 dan turun drastis pada tahun 2020 menjadi 0.06%. Hal tersebut lantaran banyak tempat hiburan di Kabupaten Demak yang ditutup, serta beberapa lokasi hiburan yang belum diatur dengan maksimal. Seperti lokasi yang hiburan yang infrastrukturnya kotor, terabaikan, kurangnya inovasi, pengorganisasian dan dukungan pemerintah, padahal mempunyai kelebihan yang cukup baik guna menambah penerimaan pajak hiburan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

<sup>146</sup>Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani, “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur”, *Jurnal Proaksi* 8, No. 2, (2021): 535

<sup>147</sup>Magdalena Silawati Samosir, Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka”, *Journal of Public Administration and Government* 2, No. 1 (2020): 41